

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah (*e-KTP*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan, (*e-medicine, elaboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik. Pemerintah menerapkan *E-government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. Terwujudnya *good governance* merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat di dunia termasuk di Indonesia, *good*

governance atau pemerintahan yang baik menekankan pada asas-asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi. Untuk mewujudkan kelima pilar tersebut, dilakukan berbagai metode sebagai alatnya yaitu dengan penciptaan *E-government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan. Serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E-government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik. *E-government* secara hukum dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengembangan *E-government* di Indonesia sudah dilaksanakan di beberapa daerah sebagai turunan pemerintah yang selalu berupaya untuk melayani publik. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintah pusat Indonesia adalah inovasi pelayanan publik dengan metode *E-government* yaitu dengan penerapan *e-KTP* atau KTP berbasis sistem informasi. *e-KTP* merupakan cara jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun *database* kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem *biometric* yang ada didalamnya. Setiap pemilik *e-KTP* dapat terhubung ke dalam satu *database* nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja. *e-KTP* adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian diri dari sisi administrasi

ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* kependudukan nasional. *e-KTP* dilengkapi dengan fitur penggunaan sidik jari, dalam penggunaan sidik jari *e-KTP* lebih canggih dari yang selama ini diterapkan untuk SIM (Surat Ijin Mengemudi).

e-KTP menjadi sangat penting dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Diantara masalah tersebut adalah mulai dari orang yang meninggal yang masih mendapatkan hak suara ataupun kepemilikan *KTP* ganda yang menyebabkan permasalahan pada kepemilikan suara ganda dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun *Pemilukada*, penerapan asuransi kesehatan bagi rakyat miskin yang tidak sampai sasaran karena penjelasan profesi di *KTP* yang kurang detail sampai dengan penyalahgunaan *KTP* sebagai alat bagi para penjahat dan teroris yang bisa jadi lebih leluasa berganti identitas. Dalam menerapkan sistem *e-KTP* ini tidak mudah membalikkan telapak tangan mengingat kegiatan ini melibatkan ratusan juta penduduk Indonesia. Kesuksesan pelaksanaan *SIAK* (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sangat didukung oleh *NIK* (Nomor Induk Kependudukan) dalam penerapan *e-KTP*. Nomor Induk Kependudukan haruslah hanya dimiliki seorang penduduk dan tidak bisa dipindahtangankan. Aplikasi *NIK* harus menyeluruh segala usia, masyarakat yang memegang *e-KTP* secara otomatis hanya memiliki satu nomor *NIK* yang terdata secara lengkap dalam *SIAK*. Data-data yang terdapat dalam *e-KTP* jauh lebih lengkap dibanding *KTP* konvensional karena secara fisik *e-KTP* memiliki

chip yang berisi memori yang menyimpan data pemegangnya secara lengkap
 bak kartu kredit yang menyimpan data transaksi.

Tabel 1. Hambatan Pelaksanaan Program e-KTP di Berbagai Wilayah di Indonesia Tahun 2011-2012

No	Nama Wilayah	Permasalahan	Hambatan/Kendala
1	Sumatera	Pelayanan Kurang Maksimal	1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan
			2. Minimnya sumber daya manusia
			3. Belum siapnya Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan e-KTP.
2	Jawa	Lambannya Pelayanan	1. Keterbatasan peralatan teknis e-KTP
3	Kalimantan	Pelayanan kurang maksimal dan belum sesuai target yang ditentukan	1. Kurangnya sosialisasi
			2. Minimnya sumberdaya manusia
			3. Belum siapnya Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan e-KTP
4	Sulawesi	Pelayanan program e-KTP belum berjalan	1. Keterlambatan peralatan e-KTP
			2. Kurangnya Sosialisasi
			3. Kurangnya daya listrik
5	Papua	Pelayanan kurang maksimal dan belum sesuai target yang ditentukan	1. Kurangnya Sosialisasi
			2. Keterlambatan Peralatan
			3. Minimnya sumber daya manusia
			4. Belum siapnya pemerintah daerah untuk menyelenggarakan e-KTP

Sumber :Data diolah dari situs

<http://search.kompas.com/fq/?page=1&q=kendala+dan+hambatan+pelaksanaan+program+ektp+di+berbagai+wilayah+indonesia&sort=score&lipsus=None&ret=20>

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pelaksanaan program *e-KTP* pada periode tahun 2011-2012 di berbagai wilayah di Indonesia masih mengalami banyak kendala sehingga pelaksanaan program ini belum berjalan sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di Lampung pada tahun 2013.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2013

Kabupaten/Kota	Penduduk/ <i>Population</i>			Rasio Jenis/Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Lampung Barat	152 979	134 609	287 588	113,65
02. Tanggamus	292 430	267 892	560 322	109,16
03. Lampung Selatan	488 637	462 207	950 844	105,72
04. Lampung Timur	505 978	482 299	988 277	104,91
05. Lampung Tengah	619 089	595 631	1214 720	103,94
06. Lampung Utara	304 684	294 240	598 924	103,55
07. Way Kanan	218 234	204 961	423 195	106,48
08. Tulang Bawang	216 468	201 314	417 782	107,53
09. Pesawaran	214 714	201 658	416 372	106,47
10. Pringsewu	194 497	184 693	379 190	105,31
11. Mesuji	100 889	91 870	192 759	109,82
12. Tulang Bawang Barat	133 272	126 402	259 674	105,44
13. Pesisir Barat	77 197	69 732	146 929	110,71
71. Bandar Lampung	475 039	467 000	942 039	101,72
72. Metro	76 828	76 689	153 517	100,18
Lampung	4 070 935	3 861 197	7 932 132	105,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung, Tahun 2015. [www.lampung.bps.go.id \(http://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/12\)](http://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/12)

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Pesawaran sendiri selama tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebanyak 416.372 jiwa dengan pembagian 214.714 jiwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 201.658 berjenis kelamin perempuan. Total jumlah penduduk di provinsi Lampung sendiri sampai

tahun 2013 adalah sebanyak 7.932.132 jiwa. Untuk mendata seluruh masyarakat di Kabupaten Pesawaran pemerintah memberikan kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran untuk memberikan pelayanan terkait berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu produk yang dibutuhkan masyarakat adalah *e-KTP*.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program *e-KTP* di Kabupaten Pesawaran berdasarkan kutipan dari situs www.rri.co.id: Masyarakat di wilayah Kabupaten Pesawaran harus bersabar mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*). Hal itu karena saat ini data *server* pusat tengah mengalami gangguan, sehingga pencetakan *KTP* Elektronik belum dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten setempat.

http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/197003/daerah/server_pusat_rusak_perekaman_ektp_di_pesawaran_terhambat.html diakses pada 13/09/15)

Selain itu adanya beberapa kendala dan masalah yang menghambat pelaksanaan *e-KTP* yang sebenarnya sama dengan Kabupaten atau Kota yang lain di Indonesia, diantaranya masih banyaknya data ganda dan kepemilikan *KTP* lebih dari satu oleh penduduk setempat. Kendala lain adalah kondisi geografis daerah, seperti keadaan wilayah Kabupaten Pesawaran yang bergunung-gunung, yang tentunya akan mempengaruhi kinerja sarana jaringan komunikasi data *online* secara. Namun instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terus memaksimalkan pelayanan

terhadap masyarakat seperti yang dikatakan Ibu Erdiana selaku Kabid Kependudukan Disdukcapil Pesawaran. “Sudah tugas kami melakukan perekaman dengan menjemput bola ke lokasi-lokasi terpencil, bahkan sudah sampai ke pulau-pulau. Seperti pahawang, Pulau Legundi, untuk mempermudah warga di daerah terhambat.”

(<http://inspirasi Lampung.com/terkendala-alat-perekam-ktp/> diakses pada 4/10/15)

Selain kendala dari sistem peralatan, kendala lainnya antara lain masih kurangnya sumber daya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan sosialisasi perihal *e-KTP* dan harus kita akui bersama bahwa data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini belum lengkap dan akurat. Selain itu, kendala lain muncul akibat dampak dari alat perekam data penduduk yang dipakai secara bergantian dari beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran mengakibatkan pelaksanaan perekaman data dalam program *e-KTP* kerap mengalami kendala berupa macetnya alat atau *error* dan tidak bisa digunakan.

Dari kendala-kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan *e-KTP* di Kabupaten Pesawaran akan terlihat bagaimana kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Kinerja menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program ini karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran akan menghasilkan kepuasan dari seluruh masyarakat yang sedang melakukan pembuatan *e-KTP*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah Bagaimana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Dalam Pelaksanaan Program *e-KTP*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan program *e-KTP*.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi ilmu administrasi publik dalam mengetahui kinerja organisasi dalam badan instansi khususnya pemerintah kabupaten Pesawaran
- b. Secara oprasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kinerja operasional program pembuatan *e-KTP*.